

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan kebutuhan dasar bagi negara berkembang (Talpur, dkk., 2014). Melalui pendidikan peningkatan kualitas kehidupan warga negara akan meningkat, maka pendidikan menjadi hak asasi setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Implementasi tiga prioritas pembangunan pendidikan nasional, meliputi pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik, menghendaki agar pemerintah memanfaatkan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan seoptimal mungkin untuk memacu pembangunan pendidikan daerah dalam rangka membangun pendidikan nasional secara keseluruhan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimulai dari suatu kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan pendidikan di daerah. Permasalahan yang muncul dalam pelayanan pendidikan adalah kemudahan dalam akses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan prasarana fisik pendidikan di berbagai daerah (Lasker, dkk., 2001).

Ketersediaan prasarana pendidikan merupakan faktor pertama yang menjadi perhatian dalam pembangunan sosial ekonomi (Aref, 2011). Dengan kata lain pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan salah satunya dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, maka ruang lingkup perencanaan pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Dalam

DEVI NURANTI, 2015

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS SEKOLAH DASAR

**BERDASARKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK USIA SEKOLAH
DI KOTA CIREBON TAHUN 2015-2019**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemenuhan kedelapan standar ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Upaya pemerintah dalam pemenuhan standar nasional pendidikan ini dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Setelah semua sekolah telah dapat memenuhi SPM, maka standar minimal ini akan ditingkatkan secara berkala sampai semua sekolah telah memenuhi SNP (Kemdikbud, 2011). Sesuai dengan PP No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP No.19 tentang SNP, pada pasal 1, SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemenuhan SNP indikator sarana prasarana merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar sarana dan prasarana berdasarkan PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun pengertian sarana dan prasarana lebih jelas tertuang dalam Peraturan Menteri pendidikan No. 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana, yaitu sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Prasarana pendidikan adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan pendidikan termasuk ruang kelas (Santoso, 2012).

Pemenuhan prasarana merupakan bagian penting dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut (Saud, 2013). Perencanaan merupakan unsur dan fungsi pertama dari manajemen yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli administrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Adams (2006, hlm 5) :

DEVI NURANTI, 2015

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS SEKOLAH DASAR

BERDASARKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK USIA SEKOLAH

DI KOTA CIREBON TAHUN 2015-2019

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Planning is an almost ubiquitous activity, engaged in by individuals, organizations, communities, and nations. It is pursued for a variety of purposes in a variety of ways, depending on what is being planned, who is doing the planning, and what assumptions are being made about the context and constraints of planning.

Fungsi dari perencanaan adalah alat bagi pengembangan *quality assurance*, perencanaan yang benar dan tepat akan memberikan jaminan bagi mutu pendidikan, selain itu perencanaan juga berfungsi untuk memperlihatkan upaya pemenuhan akuntabilitas suatu lembaga, misalkan dalam hal ini lembaga pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, perencanaan meliputi berbagai aspek kegiatan dalam pendidikan, begitu pula dalam hal perencanaan yang sifatnya pembangunan fisik, atau fasilitas pendidikan, perencanaan yang dilakukan bersifat *middle range* dan *long range* dengan jangka perencanaan lima, sepuluh, lima belas dan dua puluh tahun yang akan datang (Banghart & Trull, 1990). Hal ini sejalan dengan Kumar (2004, hlm 142) “*educational planning in physical terms plans of school building, layout of school building and their proper setting establishing environmental criteria for learning activities*”.

Perencanaan pendidikan memiliki empat pendekatan (Saad, 2013) yaitu: pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*); pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*); pendekatan untung rugi (*cost and benefit approach*); dan pendekatan keefektifan biaya (*cost effectiveness approach*) dan pendekatan integratif (pendekatan sistemik atau pendekatan sinergik).

Perencanaan yang menggunakan pendekatan *social demand* merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk mengatasi pemerataan akses pendidikan dalam pemenuhan SPMP dan SNP. Seperti pendapat Kumar (2004, hlm 143) “*The estimates of the social demand based upon the demographic trends, an also based upon the transition probabilities of enrolment, the admission rates, the retention rules do and wastage roles etc. at different level of education*”. Jadi, dasar dari perencanaan pendidikan dasar adalah dengan pendekatan *social demand* yang dasarnya adalah pertumbuhan penduduk usia sekolah (PUS), artinya perencanaan ini didasarkan pada tren kependudukan. Dalam menghitung jumlah pertumbuhan PUS, menggunakan metode dengan teknik Proyeksi. Proyeksi adalah inti dari

perencanaan pendidikan karena proyeksi berfungsi untuk mengkonversi tujuan dicari dalam skenario kuantitatif. Menurut Unesco (2010, hlm.3) :

Projection techniques are at the core of educational planning as they serve to convert the sought objectives into quantifiable scenarios. They are requisite tools for policy dialogue and the formulation of educational strategies. Projections and simulation models make it possible to translate the requisite tasks into calculations of the financial, physical and human resources required.

Dengan kata lain, proyeksi merupakan alat yang diperlukan untuk penentuan kebijakan dan perumusan strategi pendidikan. Proyeksi memungkinkan untuk menerjemahkan tugas yang diperlukan dalam perhitungan keuangan, fisik dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Proyeksi PUS dimaksudkan untuk mengetahui jumlah penduduk usia sekolah dalam suatu kawasan, yang digunakan sebagai data dasar dalam menghitung kebutuhan ruang belajar atau RKB yang dibutuhkan, kemudian mengestimasi jumlah biaya pembangunan per unit ruang kelas yang dibutuhkan oleh SD yang sesuai dengan kriteria SNP yaitu ruang kelas yang berkapasitas maksimum 28 peserta didik agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan secara optimal.

Perubahan penduduk yang terus terjadi akan menciptakan perubahan kebutuhan sosial dalam pendidikan. Akibatnya akan memunculkan perubahan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan, hal ini sejalan dengan pendapat Dash dan Dash (2008, hlm 22) *“a pressing demand for further expansion of educational facilities the social demand puts emphasis on planning and streamlining educational expiation on the basic of demands in the society”*. Kebutuhan akan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, menjadi masalah di berbagai daerah, dan menjadi kewajiban pemerintah daerah yang wajib untuk dipenuhi (Asadullah, 2009).

Berdasarkan studi pendahuluan, penelitian ini menerapkan pendekatan *social demand* dalam perencanaan prasarana pendidikan dan yang menjadi kajian adalah kota Cirebon. Data penduduk kota Cirebon menunjukkan, jumlah penduduk usia masuk SD pada setiap tahunnya mengalami perubahan, terlihat dari data Disdukcapil kota Cirebon tahun 2010 sebanyak 10125 jiwa dan tahun 2014 sebanyak 10504 jiwa. Hal ini menyebabkan perlunya perencanaan dan

DEVI NURANTI, 2015

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS SEKOLAH DASAR

BERDASARKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK USIA SEKOLAH

DI KOTA CIREBON TAHUN 2015-2019

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

analisis berdasarkan penduduk usia sekolah agar dapat memproyeksikan jumlah peserta didik baru yang akan berdampak pada jumlah rombongan belajar dan jumlah ruang kelas yang dibutuhkan selama lima tahun yang akan datang.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk usia 5-9 tahun 2010 dan 2014

No	Kecamatan	Kelompok umur/Jenis Kelamin					
		5-9 (2010)			5-9 (2014)		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	KEJAKSAN	2061	1915	3976	2303	2201	4504
2	KESAMBI	3260	3033	6293	3668	3462	7130
3	HARJAMUKTI	5306	5064	10370	5996	5584	11580
4	LEMAHWUNGKUK	2734	2521	5255	2894	2687	5581
5	PEKALIPAN	1356	1234	2590	1486	1294	2780

Sumber : Disdukcapil kota Cirebon

Dari data diatas dapat diolah menjadi data yang lebih spesifik, maka ditemukan data penduduk usia masuk sekolah atau 6 tahun dan 7 tahun, dari tahun 2010 dan tahun 2014. Data tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah penduduk usia sekolah 6 dan 7 tahun 2010 dan 2014.

NO	KECAMATAN	2010			2014		
		6 thn	7 thn	Total	6 thn	7 thn	Total
1	KEJAKSAN	777	624	1401	880	621	1501
2	KESAMBI	1234	995	2229	1392	982	2374
3	HARJAMUKTI	2016	1695	3711	2270	1581	3851
4	LEMAHWUNGKUK	1028	844	1872	1093	777	1870
5	PEKALIPAN	506	406	912	529	379	908
Jumlah		5561	4564	10125	6164	4340	10504

Sumber : dimodifikasi dari data Disdukcapil kota Cirebon

Penduduk usia sekolah yang diproyeksikan akan terserap di sekolah dasar pada tahun berikutnya adalah yang berusia 6 tahun dan 7 tahun, hal ini sesuai dengan pendapat Crittenden (2005, hlm.13) “*elementary refers to student groups in grade kindergarten through six*”. Berdasarkan data ditemukan fakta bahwa semakin bertambahnya penduduk usia sekolah di kota Cirebon, tidak sekaligus menjadikan jumlah peserta didik di SD semakin bertambah. Berdasarkan dari trend yang terjadi pada setiap tahunnya jumlah pendaftar atau peserta didik baru mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti nilai angka serap kasar penduduk usia sekolah dan pertambahan jumlah Madrasah Ibtidaiyah yang semakin bertambah banyak. Data 2014 ada 1 MIN dan 19 MIS yang tumbuh

DEVI NURANTI, 2015

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS SEKOLAH DASAR

BERDASARKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK USIA SEKOLAH
DI KOTA CIREBON TAHUN 2015-2019

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di Cirebon, yang menyerap sebagian penduduk usia sekolah. Adapun jumlah peserta didik baru dari tahun 2010-2014, terlihat dari tabel berikut :

Tabel.1.3. Jumlah Pendaftar Peserta Didik Baru Tahun 2010-2014

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar Siswa Baru/ Kls 1				
		2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
1	Kejaksan	1236	1272	1267	1244	1142
2	Kesambi	1847	2219	2204	1943	1830
3	Lemahwungkuk	810	761	772	737	720
4	Pekalipan	469	511	510	443	458
5	Harjamukti	1910	1821	1804	2009	1880
	Jumlah	6272	6584	6557	6376	6030

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Cirebon

Walaupun terjadi tren penurunan jumlah peserta didik baru, bukan berarti tidak terdapat masalah dalam pendidikan. Masalah yang muncul adalah adanya kesenjangan antara jumlah rombongan belajar yang terselenggara di sekolah dasar dengan jumlah ruang kelas yang tersedia, hal ini jauh dari standar SNP bahkan Standar pelayanan minimal (SPM).

Kesenjangan antara kebutuhan ruang kelas dan kondisi eksisting yang ada di kota Cirebon pada tahun 2014/2015, dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel.1.4. Kesenjangan Jumlah Rombel Dan Ruang Kelas Tahun 2014

No	KECAMATAN	SEKOLAH	ROMBEL	R.KELAS	KONDISI RUANG KELAS				JUMLAH
					BAIK	RR	RS	RB	
1	Kejaksan	34	217	210	182	13	8	7	210
2	Kesambi	44	368	331	279	34	10	8	331
3	Harjamukti	43	324	282	158	61	40	23	282
4	Lemahwungkuk	27	184	179	138	21	12	8	179
5	Pekalipan	14	94	79	56	15	4	4	79
	JUMLAH	162	1187	1081	813	144	74	50	1081

Sumber; Dinas Pendidikan Kota Cirebon

Kesenjangan antara jumlah kelas yang ada dengan jumlah rombongan belajar pada setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2014/2015 jumlah rombel yang ada sebanyak 1187 rombel sedangkan kelas yang tersedia hanya 1081 ruang kelas dengan kondisi fisik bangunan ruangan baik sebanyak 813, rusak ringan sebanyak 114, rusak sedang sebanyak 50, dan rusak berat sebanyak 50 ruangan. Dari data ini maka kota Cirebon masih kekurangan ruang kelas sebanyak 106 ruang kelas

DEVI NURANTI, 2015

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS SEKOLAH DASAR

BERDASARKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK USIA SEKOLAH

DI KOTA CIREBON TAHUN 2015-2019

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

baru dan ruang kelas rehab rusak berat sebanyak 50 unit. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan standar baik SPM dan SNP yang mewajibkan rasio ruang kelas dengan rombel adalah 1:1, dengan ketentuan jumlah peserta didik yang berjumlah 28 orang perkelas, dan SPM dengan rasio 1: 32, artinya jumlah siswa 32 orang/kelas/rombel. Masalah ini akan terus berlanjut apabila tidak dibuat perencanaan yang tepat untuk mengatasinya.

Dari pembahasan dan data, sangat jelas nampak bahwa perubahan jumlah penduduk usia sekolah, akan merubah pula jumlah peserta didik baru yang akan terserap di sekolah dasar, yang akan berdampak pula pada jumlah kebutuhan RKB yang harus direnovasi dan dibangun, serta jumlah biaya per unit RKB yang harus disiapkan oleh Pemerintah daerah kota Cirebon. Dengan membuat prediksi yang akurat akan membantu Dinas Pendidikan membuat rencana strategis dalam pemenuhan SPM dan pencapaian SNP, yang berdampak positif terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Fungsi perencanaan dalam pendidikan pada dasarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, selain itu perencanaan juga mempunyai fungsi untuk menghindari pemborosan sumber daya yang dibutuhkan. Efisiensi dan efektifitas akan diperoleh dari kegiatan perencanaan karena, didalam perencanaan yang bersifat sistematis terdapat estimasi dan proyeksi masa depan akan tergambarkan pada saat ini, sehingga akan memudahkan dalam memperhitungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pendidikan yang semakin kompleks.

Pendekatan dalam perencanaan pendidikan mencakup *social demand approach*, *manpower approach*, *cost and benefit approach*, *cost effectiveness approach* dan pendekatan integratif. Salah satu pendekatan perencanaan yang lazim digunakan di negara berkembang adalah *social demand approach*, dan yang menjadi dasar pendekatan ini adalah kependudukan. Proyeksi penduduk adalah suatu usaha untuk memperkirakan jumlah penduduk pada masa yang akan datang dengan memperhitungkan data penduduk dimasa lalu dan masa kini, terutama yang terkait trend atau kecenderungan-kecenderungan pertumbuhannya (BPS

DEVI NURANTI, 2015

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS SEKOLAH DASAR

BERDASARKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK USIA SEKOLAH

DI KOTA CIREBON TAHUN 2015-2019

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2013; BAPPENAS 2010; Matin, 2013, dan UNFPA, 2005). Dalam membuat proyeksi perlu dipahami asumsi proyeksi yang digunakan seperti asumsi target dan sumber data yang menggambarkan masa lalu dan tren saat ini.

Proyeksi penduduk menjadi syarat utama dalam melakukan proyeksi lainnya seperti proyeksi jumlah prasarana pendidikan yang dibutuhkan, yang nantinya akan dianalisis berdasarkan kepada SPM dan SNP sebagai indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan perwujudan pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan dasar, termasuk di dalamnya adalah tersedianya fasilitas pendidikan yang layak. Fasilitas pendidikan merupakan prioritas penunjang dalam melengkapi pemenuhan ketersediaan infrastruktur sosial di suatu pemukiman (Musdalifah, 2009). Proyeksi penduduk usia sekolah sangat diperlukan dalam menyusun perencanaan pendidikan karena merupakan indikator pertama dan subjek utama dalam program wajardikdas dan pemerataan pendidikan dengan pencapaian SPM dan SNP.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah “Analisis Kebutuhan Ruang Kelas Sekolah Dasar Berdasarkan Pertumbuhan Penduduk Usia Sekolah di Kota Cirebon Tahun 2015-2020 (Implementasi *Social Demand Approach* dalam Perencanaan Pendidikan)”. Adapun masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, berikut :

1. a. Berapa proyeksi jumlah penduduk kota Cirebon tahun 2015-2019?
 b. Berapa proyeksi jumlah penduduk usia sekolah (7-12) tahun di kota Cirebon pada tahun 2015-2019?
 c. Berapa proyeksi jumlah penduduk usia masuk sekolah (6 dan 7) tahun di kota Cirebon pada tahun 2015-2019?
 d. Berapa proyeksi jumlah peserta didik keseluruhan berdasarkan APK pada tahun 2015-2019?
2. Berapa proyeksi jumlah peserta didik baru yang terserap oleh SD, pada setiap kecamatan di kota Cirebon pada tahun 2015-2019?
3. Berapa proyeksi jumlah ruang kelas yang dibutuhkan pada setiap kecamatan di kota Cirebon pada tahun 2015-2019?

4. Berapa estimasi jumlah biaya ruang kelas sekolah dasar yang diperlukan pada setiap kecamatan di kota Cirebon pada tahun 2015-2019?
5. Bagaimana pengadaan anggaran ruang kelas sekolah dasar di kota Cirebon pada tahun 2015 sampai tahun 2019?

3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan *untuk mendapatkan informasi*, mengenai:

1. a. Terdeskripsikannya proyeksi jumlah penduduk kota Cirebon 2015-2019.
b. Terdeskripsikannya proyeksi jumlah penduduk usia sekolah (7-12) tahun di kota Cirebon pada tahun 2015-2019.
c. Terdeskripsikannya proyeksi jumlah penduduk usia masuk sekolah (6 dan 7) tahun di kota Cirebon pada tahun 2015-2019.
d. Terdeskripsikannya jumlah peserta didik keseluruhan berdasarkan APK pada tahun 2015-2019.
2. Terdeskripsikannya jumlah proyeksi jumlah peserta didik baru yang terserap oleh SD/MI, pada setiap kecamatan di kota Cirebon pada tahun 2015-2019.
3. Terdeskripsikannya jumlah ruang kelas yang dibutuhkan pada setiap kecamatan di kota Cirebon pada tahun 2015-2019.
4. Teranalisisnya estimasi jumlah biaya ruang kelas yang diperlukan pada setiap kecamatan di kota Cirebon pada tahun 2015-2019.
5. Terdeskripsikannya pengadaan anggaran ruang kelas kecamatan Harjamukti kota Cirebon pada tahun 2015 sampai tahun 2019.

4. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan keilmuan mengenai keterampilan menyusun perencanaan pendidikan dalam membuat proyeksi kebutuhan aspek pendidikan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : bagi pihak pemerintah daerah kota Cirebon sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis pendidikan kota Cirebon, dan membantu

DEVI NURANTI, 2015

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS SEKOLAH DASAR

BERDASARKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK USIA SEKOLAH
DI KOTA CIREBON TAHUN 2015-2019

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menghitung estimasi biaya pembangunan prasarana pendidikan yang dibutuhkan lima tahun mendatang.

5. Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi dari penulisan tesis ini terdiri atas 5 (lima) Bab. Adapun penulisan tiap babnya yaitu :

Bab I berisi tentang uraian pendahuluan, yang di dalamnya berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, perumusan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi dalam tesis ini.

Bab II berisi tentang kajian pustaka, tentang *social demand* dalam perencanaan pendidikan, konsep demografi dalam perencanaan pendidikan, konsep proyeksi, manajemen mutu serta berisi mengenai konsep sarana dan prasaran pendidikan terutama mengenai ruang kelas.

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, yang meliputi lokasi dan subjek penelitian, desain dan metode penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian, serta berisi pembahasan atau analisis temuan.

Bab V tentang kesimpulan dan implikasi serta rekomendasi, menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian serta saran atau rekomendasi yang dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, serta kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.